



PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK BAGI APARATUR DESA DI DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Moeljono^{1*}, Williyanto Kartiko Kusumo²

¹Prodi Manajemen, Universitas Semarang, Indonesia, sastro@usm.ac.id

²Prodi Akuntansi, Universitas Semarang, Indonesia, willyanto@usm.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Diharapkan melalui kegiatan ini akan mendorong kecakapan aparatur desa dalam pengambilan keputusan publik dengan mengedepankan skala prioritas keputusan yang diambil. Tujuan dari pengabdian masyarakat adalah memberikan pelatihan penerapan pengambilan kebijakan publik dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Metode kegiatan digunakan Participatory Learning and Action. Kegiatan dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pelatihan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, peserta memiliki respon dan antusias terhadap pelatihan dan tercipta perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kata Kunci: *Pelatihan, Kebijakan Publik, Aparatur Desa.*

Abstract: *It is expected that these activities will encourage proficiency in the village officials to prioritize public decision making decisions priorities. The purpose of this public service activities is to provide training implementation of public policy making in improving the capacity of government personnel village. The method used is activity Participatory Learning and Action. This activity is carried out with an emphasis on activities of lectures, discussions, brainstorming performed interactively with members of the group and continued with the action or real activities relevant to the training materials. The results of community service activities run in accordance with a predetermined plan, the public has an enthusiastic response and to training and create changes in knowledge, attitudes and skills in making public policy.*

Keywords: *Training, Public Policy, Village Apparatus.*

RiwayatArtikel: Diterima: 17-Desember-2019, Disetujui: 06-Januari-2020



<https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.1547>



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Desa Tegalarum, terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terdiri dari 3 (tiga) perdukahan yakni, Ngumpul, Blado dan Ngaluran, dan jumlah RW 4 yang terbagi menjadi 20 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 5.228 jiwa (Kabupaten Demak, 2019). Desa ini sangat strategis dalam sistem dan skema kebijakan publik terutama dalam tahap implementasi, baik kebijakan publik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, mengingat posisi desa yang berbatasan dengan kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai jalur

alternatif pantura, sehingga tercipta dinamika perubahan sosial dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik yang cukup tinggi.

Dinamika tersebut, sangat cepat berpengaruh di tingkat lokal, nasional maupun global dan memerlukan respon yang cepat, sekaligus menyiapkan antisipasi terhadap munculnya dampak yang mungkin muncul. Lompatan teknologi yang begitu cepat, akan membawa tantangan baru bagi pengambil keputusan.

Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas yang mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas kebijakan pada akhirnya menjadi keharusan, karena perubahan akan berdampak bagi masyarakat. Kualitas kebijakan yang rendah dapat dikenali melalui beberapa aspek, misalnya rendahnya tingkat kepatuhan yang mengakibatkan biaya sosial kebijakan yang tinggi, prosedur yang berlebihan atau tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan ketidakjelasan urgensi keberadaan suatu kebijakan publik. Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berupa kebijakan berdampak luas pada masyarakat.

Kebijakan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Demikian pula dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Pemerintahan disemua tingkatan pasti berhadapan dengan kelangkaan sumberdaya yang terbatas, dan berbagai masalah publik yang makin kompleks, maka pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan tersebut, agar tidak menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan, tidak kecuali pada level pemerintahan desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Oleh karena pemerintah desa dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah publik yang makin kompleks di sisi lain, pemerintah desa tidak mungkin menyelesaikan semua masalah tersebut secara bersamaan.

Aparatur Pemerintahan, harus menentukan pilihan menyelesaikan permasalahan publik tersebut berdasarkan skala prioritas. Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik. Timbulnya kebijakan publik dilandasi adanya kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para *stakeholders*, terutama pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Maka, pemerintahan yang dikelola oleh para aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan. Dalam hal ini peran kebijakan publik dan perumus kebijakan publik menjadi sangat vital.

Ada tiga elemen kebijakan: pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir karena tuntutan yang merupakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor lingkungan tersebut antara lain: sosial ekonomi, sumberdaya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam melakukan pengambilan kebijakan publik adalah: 1. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting), 2. Formulasi kebijakan. 3. Adopsi kebijakan, 4. Implementasi kebijakan dan proses pemantauan tahapan, dan 5. Evaluasi kebijakan (Dunn, 2003).

Unsur tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh aparatur pemerintah desa Tegalarum, sehingga belum terpenuhinya keinginan dan kepuasan masyarakat, karena masyarakat belum diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya disebabkan adanya kepercayaan yang besar terhadap kepala desa dan aparatur desa. Permasalahan ini merupakan masalah klasik yang ada didesa, yakni terkait dengan aspek pengambilan keputusan kebijakan yang bersifat sentralistik dimana masih besarnya pengaruh kepala desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan.

Melihat permasalahan tersebut, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan pengambilan kebijakan yang mampu berfungsi sebagai penopang kesejahteraan masyarakat, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan Penerapan Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Tegalarum, yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan aparatur desa Tegalarum.

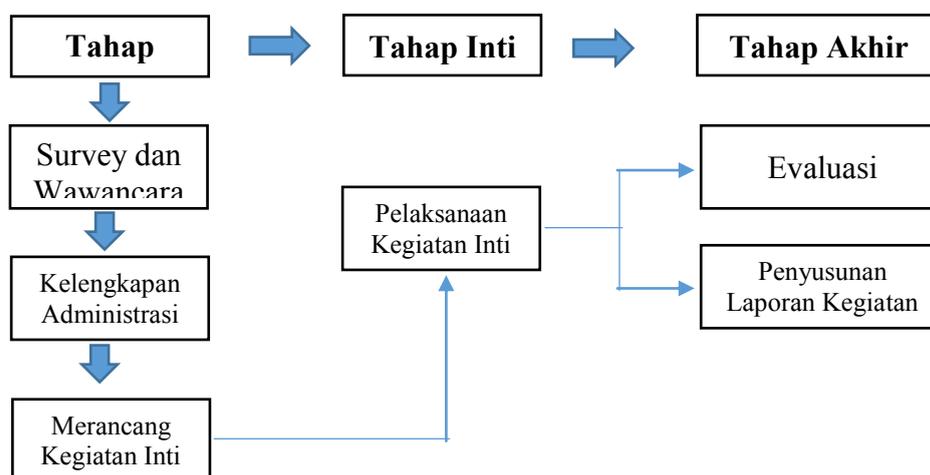
Kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa tentang pengambilan dan implementasi kebijakan Publik. Dengan harapan akan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi, sehingga pelatihan lebih bersifat penerapan segera untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian, jadi lebih bersifat praktis (Manullang, 2002). Permasalahan yang adalah para aparatur pemerintahan desa Tegalarum bimbang dalam menentukan skala prioritas permasalahan dan menetapkan keputusan yang diambil. Hal ini dikarenakan permasalahan di tingkat masyarakat sangat kompleks dan perlu penanganan segera.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah *Participatory Learning and Action* (PLA) merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya lebih dikenal dengan "*Learning by Doing*" atau belajar sambil bekerja (Mardikanto & Soebiato, 2012). *Participatory Learning Action*

merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan secara interaktif dalam suatu proses kerja (Appel, Buckingham, Jodoin, & Roth, 2012) (Thomson & Mabey, 1994). Konsep kegiatan PLA dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif dengan anggota kelompok dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat (Theresia, Andini, Nugraha, & Mardikanto, 2014).

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa hari. Seperti halnya kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Jatisela Lombok Barat, berlangsung selama tiga hari, yaitu hari I penyampaian teori, hari II dan III digunakan untuk latihan (Ihsani, Untari, & Darmutika, 2018). Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintahan Desa Tegalarum, berjumlah 7 (tujuh) orang. Pelaksanaan kegiatan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Bagan Tahapan Kegiatan.

Berikut penjelasannya pada tahap kegiatan.

1. Tahap Awal

Kegiatan pada tahap ini meliputi

- a. Survey, Merupakan kegiatan awal untuk menganalisis dan mencari informasi secara menyeluruh mengenai permasalahan agar dapat ditemukan solusi yang tepat sasaran.
- b. Kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian
- c. Merancang dan menyusun kegiatan pelatihan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan.

2. Tahap Inti

Proses kegiatan pada tahap ini adalah fokus pada kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu pendampingan dan bimbingan melalui serangkaian

pelatihan. Agenda kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah penerapan kebijakan publik.

Target sasaran peserta pelatihan adalah aparaturnya pemerintahan desa dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melihat indikator tahapan perubahan perilaku berdasarkan skala 0-25 kategori rendah, skala 26-50 kurang, skala 51-75 cukup dan skala 76-100 tinggi.

3. Tahap Akhir

Ada dua kegiatan dalam tahap ini yaitu:

- a. evaluasi kegiatan yang akan dilakukan kegiatan dan secara menyeluruh;
- b. penyusunan Laporan Pengabdian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Awal

Kegiatan pendampingan dilakukan selama 1 hari, namun didahului dengan analisis situasi sosial yakni survey. Tahap Survey dan Analisis Situasi Sosial, dilakukan dengan melibatkan beberapa warga desa dengan tujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan permasalahan yaitu aspek kelembagaan desa, aspek manajemen pelayanan aparaturnya desa, aspek kebijakan desa, aspek pembangunan desa, aspek kesehatan, aspek infrastruktur dan aspek kebijakan pemerintahan desa.

Kegiatan difokuskan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa kepala keluarga. Hasil survey selanjutnya diolah dengan membuat matrik hasil survey dan wawancara. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Survey dan Analisis Situasi Sosial

No	Aspek	Hasil Survey dan Wawancara
1	Kelembagaan Desa	Pola Hierarki.
2	Pelayanan Desa	Belum memberikan kepuasan terhadap masyarakat dari sisi kemudahan dan kecepatan pelayanan.
3	Kebijakan Desa	Kurang cepat dalam merespon isu-isu yang berkembang dan belum ada skala prioritas keputusan yang akan diambil.
4	Pembangunan Desa	Didominasi pembangunan infrastruktur.
5	Kesehatan	Kesadaran hidup sehat bagus walaupun terdapat keterbatasan
6	Infrastruktur	Sudah maksimal dan sampai saat ini menjadi prioritas utama
7	Kebijakan	Pengambilan keputusan masih bersifat sentralistik dan kebijakan dilakukan secara <i>top down</i>

2. Tahap Inti (Kegiatan Pelatihan Pengambilan Kebijakan Publik)

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi diberikan terkait program yang akan dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor desa dengan dihadiri seluruh aparatur desa. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi program pelatihan penerapan kebijakan publik yang dilaksanakan di Desa Tegalarum selama satu hari.

Kegiatan sosialisasi program yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2019 ini dihadiri oleh kepala desa, ketua BPD dan aparatur desa bertempat di Pendopo Desa Tegalarum. Pada saat sosialisasi respon yang diberikan sangatlah antusias dan mendorong agar kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya kepala desa dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintahan desa serta menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Pelatihan Implementasi Kebijakan Publik

N	Kegiatan	Waktu	Ket.
1	Sosialisasi program	26 Maret 2019	Tim
2	Kegiatan Pelatihan Kebijakan Publik	26 Maret 2019	Moeljono. Williyanto K Kusumo.
4	Penyusunan Laporan Kegiatan	30 Maret 2019	Tim

2. Kegiatan Pelatihan Pengambilan Kebijakan Publik

Kegiatan, diikuti oleh aparatur pemerintahan desa. Materi-materi yang diberikan adalah Mapping Permasalahan, Analisa SWOT dan Pengukuran Skala Prioritas. Kegiatan dilaksanakan tanggal 26 Maret 2019, diikuti oleh seluruh aparatur pemerintahan desa, berjumlah 7 orang.

3. Tahap AKHIR

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dilakukan evaluasi. Prosedur evaluasi dikaitkan dengan kriteria keberhasilan. Evaluasi pelatihan merupakan bagian yang penting dalam kurikulum, yakni sebagai usaha pengumpulan informasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, (Hamalik, 2000).

Untuk itu perlu disusun seperangkat instrument pengukuran tertentu. Pada kegiatan pelatihan ini sebagai aspek instrument adalah reaksi, pelajaran, tingkah laku dan hasil, berikut hasil evaluasi program pelatihan aparatur pemerintah desa Tegalarum seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi dan Penilaian Pelatihan Penerapan Kebijakan Publik

No	Aspek	Keterangan	Nilai/Skor
1	Reaksi	Peserta menyambut baik kegiatan pelatihan dan mengikutinya dengan sangat antusias	75
2	Pelajaran	Mempelajari fakta, prinsip-prinsip dan pendekatan yang tercakup dal. latihan.	70
3	Tingkah laku	Pola pekerjaan berubah karena mengikuti pelatihan dan dapat merubah etos dan budaya kerja dalam oraganisasi.	70
4	Hasil	Peserta dapat mengukur biaya dalam implementasi kebijakan publik, perbaikan kinerja dalam pelayanan publik dan mampu membuat struktur birokrasi yang handal dalam melayani masyarakat	70
Nilai/Skor			71,25

Pada tabel 3 digambarkan bahwa rata-rata perubahan perilaku aparatur sebesar 71,25 atau berada pada kategori cukup, hal ini disebabkan kesadaran dan kemauan untuk mengikuti kegiatan pelatihan sangat besar, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa tingkat perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan pelatihan cukup baik, sedangkan sisanya sebesar 28,75 perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Hasil evaluasi diperlukan sebagai informasi masukan bagi pengelola program dan pengembangan program pelatihan selanjutnya, yang mendukung program pelatihan berkelanjutan. Hal ini dikarekakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi dari politik, ekonomi, sosial dan kultural. Salah satu implikasinya, kebijakan publik pun senantiasa berinteraksi dengan dinamika dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultural di mana kebijakan itu diimplementasikan (Nugroho, 2014).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu tingkat keberhasilan pencapaian dengan menggunakan indikator perubahan perilaku untuk kegiatan pelatihan penerapan pengambilan kebijakan publik sebesar 71,25 yaitu berada pada kategori cukup. Aparatur Pemerintahan Desa Tegalarum sebagai mitra pengabdian masyarakat memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Kegiatan pengabdian seharusnya dilakukan secara kebersinambungan agar kapasitas dan kemampuan aparatur desa terus meningkat seiring meningkatkannya perubahan dinamika masyarakat. Pengabdian selanjutnya diarahkan tidak hanya pada aparatur desa namun juga kepada masyarakat secara luas,

karena masyarakatlah yang secara substansi pemegang kedaulatan pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mempublikasikan artikel pengabdian ini, semoga di masa datang dapat tercipta hubungan yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Appel, K., Buckingham, E., Jodoin, K., & Roth, D. (2012). Participatory learning and action toolkit: For application in BSR's global programs. *Paris: BSR*.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (terjemahan). *Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta*.
- Hamalik, O. (2000). Pengembangan sumber daya manusia. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara*.
- Ihsani, B. Y., Untari, T., & Darmutika, L. A. (2018). Pelatihan Penulisan Surat Dinas Pada Perangkat Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat. *JCES/ FKIP UMMat, 1(1)*, 23–29.
- Kabupaten Demak. (2019). Data Topografi Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen.
- Manullang, M. (2002). Manajemen Personalial, Jakarta: Ghalia Indonesia. *Siagian, SP*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). Public Policy (Teori Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan) Edisi Kelima Revisi. *Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, 11(1)*, 1–12.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta.
- Thomson, R., & Mabey, C. (1994). *Developing human resources*. Routledge.